



PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan defisit dan penggeseran anggaran pada unit organisasi, antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.064.173.909.413,- bertambah sejumlah Rp. 29.246.553.380,- sehingga menjadi Rp. 1.033.898.351.956,- dengan rincian sebagai berikut :

4

h

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	1.004.651.798.576,-
b. Bertambah	Rp.	29.246.553.380,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.033.898.351.956,-

2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.064.173.909.413,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	48.985.063.472,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.113.158.972.885,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(79.260.620.929),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	71.574.110.837,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	18.738.510.092,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	90.312.620.929,-

b. Pengeluaran.

1). Semula	Rp.	12.052.000.000,-
------------	-----	------------------

4

h

2). Bertambah/berkurang	Rp.	(1.000.000.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	11.052.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	79.260.620.929,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

1). Semula	Rp.	157.625.950.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	33.581.341.450,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	191.207.291.450,-

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp.	805.863.061.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(12.334.788.070,-)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	793.528.272.930,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp.	41.162.787.576,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	8.000.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	49.162.787.576,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah.

1). Semula	Rp.	40.850.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	6.000.000.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	46.850.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp.	14.315.400.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	5.569.428.600,-
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	19.884.828.600,-

4

h

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 3.750.000.000,-

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 250.000.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula Rp. 98.710.550.000,-

2). Bertambah/berkurang Rp. 21.761.912.850,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Setelah perubahan Rp. 120.472.462.850,-

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp. 18.777.702.000,-

2). Bertambah/berkurang Rp. 4.758.299.930,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 23.536.001.930,-

f

h

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp.	517.773.439.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	517.773.439.000,-

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp.	269.311.920.000,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	(17.093.088.000,-)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	252.218.832.000,-

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp.	,-
2). Bertambah/berkurang.	Rp.	,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	,-

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp.	,-
------------	-----	----

f

h

2). Bertambah/berkurang	Rp.	,-
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	,-
c. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	32.002.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	8.000.000.000,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	40.002.000.000,-
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1). Semula	Rp.	4.160.787.576,-
2). Bertambah/berkurang.	Rp.	0,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	4.160.787.576,-
e. Lain-lain pendapatan		
1). Semula	Rp.	,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	,-
Jumlah Insentif Pemerintah Pusat	Rp.	,-

\$

h

f. Dana Insentif Daerah (DID)

1). Semula	Rp.	5.000.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,-

Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung.

1). Semula	Rp.	512.633.156.326,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	20.811.510.675,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	533.444.667.001,-

b. Belanja langsung.

1). Semula	Rp.	551.540.753.087,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	28.173.552.797,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	579.714.305.884,-

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	505.401.821.549,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	19.529.510.675,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	524.931.332.224,-
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp.	2.212.500.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	2.212.500.000,-
c. Belanja hibah		
1). Semula	Rp.	3.750.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	1.359.000.000,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	5.109.000.000,-
d. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0,-

e. Belanja tidak terduga

1). Semula	Rp.	500.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(77.000.000,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	423.000.000,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/kabupaten/
kota dan pemerintahan desa

1).Semula	Rp.	768.834.777,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	768.834.777,-

g. Belanja Hutang

1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	0,-

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.	27.519.056.000,-
------------	-----	------------------

f

f

2). Bertambah/berkurang	Rp.	3.150.007.090,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	30.669.063.090,-
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp.	312.546.327.094,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	30.655.999.315,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	343.202.326.409,-
c. Belanja modal		
1). Semula	Rp.	211.475.369.993,-
2). Berkurang/berkurang.	Rp.	(5.632.453.608,-)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	205.842.916.385,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1). Semula	Rp.	71.574.110.837,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	18.738.510.092,-

4

4

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	90.312.620.929,-
b. Pengeluaran sejumlah		
1). Semula	Rp.	12.052.000.000,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(1.000.000.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	11.052.000.000,-
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1). Semula	Rp.	71.574.110.837,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	18.738.510.092,-
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	90.312.620.929,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-

4

ke

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1).	Semula	Rp.	0,-
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,-
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1).	Semula	Rp.	0,-
2).	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1).	Semula	Rp.	0,-
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.		0,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.		0,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1). Semula	Rp.		0,-
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.		0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	(1.000.000.000,-)	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1). Semula	Rp.	11.052.000.000,-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,-

4

h

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	11.052.000.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/(Berkurang).	Rp.	0,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Pembayaran Uang Kepada Pihak Ketiga		
1). Semula	Rp.	0,-
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pem,KJbayaran Uang Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 September 2016

WALIKOTA GORONTALO,

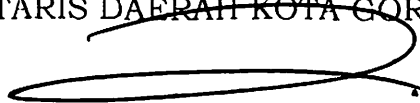


MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO 6,36/2016